

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD Kota Padang merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Proses ini tidak hanya mencakup pencatatan pengeluaran, tetapi juga memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan selama perjalanan dinas sesuai dengan tujuan dan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, laporan pertanggungjawaban berfungsi sebagai alat untuk menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran serta diarahkan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan publik. (Haryanti, N & Apriliani, S: 2022)

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Perjalanan Dinas menjadi salah satu bentuk realisasi prinsip akuntabilitas. Sebab, apapun yang berkaitan dengan keuangan negara tentu membutuhkan pertanggungjawaban yang akurat dan akuntabel. Sesuai dengan pernyataan Bachtiar & dkk (dalam Hunta dkk :2000) bahwa di dalam pemerintahan, keuangan Negara yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi dalam UUD 1945 pasal 23 ayat (5). Begitu pentingnya akuntabilitas bagi pemerintah terlebih lagi bersangkut paut dengan keuangan. Akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atau atasan terhadap usaha mencapai tujuan tertentu (Tamara & Konde, 2016). Bagi pemerintahan, akuntabilitas menjadi kewajiban yang harus dipenuhi, dimana suatu kewajiban memiliki konsekuensi berupa penghargaan ataupun sanksi. Jika,

pemerintah tidak menerapkan akuntabilitas maka akan mempengaruhi kualitas kinerja dan menjadi peluang terjadinya penggunaan dana yang tidak tepat.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas adalah sebuah proses yang kompleks namun penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana. Pertanggungjawaban Belanja perjalanan dinas merupakan dokumen administratif yang memuat informasi terperinci mengenai aktivitas perjalanan yang dilaksanakan oleh pegawai, mencakup tujuan perjalanan, periode pelaksanaan, rincian komponen biaya, serta uraian laporan aktivitas yang dilakukan selama periode perjalanan tersebut. Laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas di kantor sekretariat DPRD adalah dokumen resmi yang menyajikan rincian pengeluaran selama perjalanan dinas anggota DPRD. Laporan ini berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Pentingnya laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas terletak pada akuntabilitas kepada publik. Dengan menyusun laporan yang transparan dan akurat, DPRD dapat menunjukkan komitmennya untuk mengelola anggaran dengan baik dan menjawab harapan masyarakat akan transparansi dalam penggunaan dana publik. Dengan memahami dan mengikuti proses penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dengan baik, kantor sekretariat DPRD dapat menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran. Remittance (2023).

Laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas berfungsi sebagai dokumen resmi yang mencatat semua pengeluaran selama perjalanan. Hal ini mencakup detail pengeluaran biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, serta pengeluaran lain yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Penyusunan Laporan ini tidak semata-mata merupakan tanggung jawab personal, tetapi juga mencerminkan

kewajiban institusional dalam memastikan akurasi, transparansi, dan akuntabilitas informasi yang disajikan mencerminkan kinerja instansi dalam mengelola anggaran yang ada. Sebelum melakukan perjalanan dinas, pegawai harus mendapatkan surat tugas dari atasan yang menjelaskan tujuan dan rincian perjalanan. Surat tugas ini menjadi dasar bagi pengeluaran yang akan dilakukan selama perjalanan. Tanpa adanya surat tugas yang sah, laporan pertanggungjawaban tidak akan dianggap valid dan dapat mengakibatkan masalah dalam proses penganggaran biaya. (Lex-Renaissance, April 2022).

Penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas diatur oleh berbagai peraturan serta berlandaskan pada ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Aturan ini ditujukan untuk membangun mekanisme pengelolaan keuangan yang menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran. Masyarakat saat ini semakin kritis dan menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Dengan adanya laporan pertanggungjawaban yang jelas dan terperinci, DPRD Kota Padang dapat menunjukkan komitmennya untuk memenuhi harapan publik dan menjaga integritas lembaga. Mekanisme ini mencerminkan komitmen DPRD Kota Padang terhadap akuntabilitas dan transparansi. Dengan laporan pertanggungjawaban yang akurat dan terbuka, DPRD dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa setiap pengeluaran didasarkan pada pertimbangan yang tepat dan mendukung tujuan yang lebih besar. (Juliyanti, 2023)

Perjalanan dinas bagi anggota DPRD tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan informasi baru, tetapi juga untuk meningkatkan efektivitas kerja mereka dalam menjalankan fungsi legislatif. Oleh karena itu, penting untuk menyusun laporan yang menunjukkan hasil dan manfaat dari perjalanan tersebut,

sebagai bentuk pertanggungjawaban. Penyusunan laporan melibatkan kolaborasi tim yang terdiri dari staf sekretariat dan anggota DPRD. Keterlibatan berbagai pihak ini guna memastikan bahwa seluruh informasi yang dibutuhkan telah tersedia secara lengkap dan akurat sehingga dapat disusun dengan benar. (Lex Generalis, feb 2022).

Mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik terhadap DPRD. Dengan laporan yang transparan dan akuntabel, DPRD dapat menunjukkan bahwa mereka bertindak untuk kepentingan masyarakat dan siap mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran yang dilakukan. diharapkan mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dapat dilakukan dengan baik, mendukung akuntabilitas, dan memenuhi ekspektasi masyarakat. Oleh karena itu saya sebagai penulis sangat berminat dalam mengetahui dan ingin mengangkat judul yaitu **“Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Padang”**

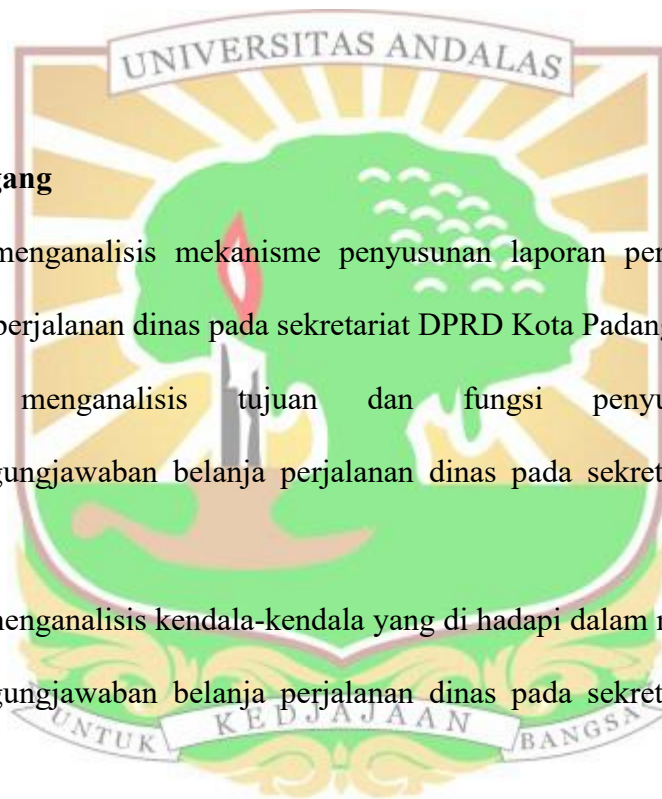


1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD kota padang ?
2. Apa tujuan dan fungsi dari penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD kota padang ?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD kota padang?

1.3 Tujuan Magang

1. Untuk menganalisis mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD Kota Padang
2. Untuk menganalisis tujuan dan fungsi penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD kota padang
3. Untuk menganalisis kendala-kendala yang di hadapi dalam menyusun laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada sekretariat DPRD kota padang



1.4 Manfaat Magang

Dalam kegiatan magang yang penulis lakukan diharapkan bisa mendapat manfaat yaitu:

1. Manfaat Bagi Penulis

Diharapkan penulisan ini dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan mengenai Bagaimana Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

2. Manfaat Praktis

Penulisan ini diharapkan mampu menyajikan informasi bagi pembaca yang bermaksud untuk mempelajari dan membahas lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kota Padang

1.5 Metode Magang

Penelitian ini diajukan dengan metode observasi lapangan selama 40 hari pada Sekretariat Kantor Kota Padang. Metode observasi ini dilakukan dengan cara pengambilan informasi melalui peninjauan secara langsung pada sekretariat Kantor DPRD Kota Padang. Dengan kata lain metode ini dilakukan secara langsung lapangan dengan cara mencatat dan mengamati Bagaimana Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kota Padang.

1.6 Tempat dan waktu Magang

Pemilihan tempat magang dilakukan Pada Sekretariat DPRD Kota Padang yang Beralamat Jl. By pass Jl. Bagindo Aziz Chan No.1, Aie Pacah, Kec. Koto Tengah, Kota Padang. Pelaksanaan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja, yang dimulai dari bulan Januari hingga bulan Maret 2025.

1.7 Ruang Lingkup Pembahasan

Dari rumusan masalah yang sudah diuraikan, penulis melihat bahwa untuk mengetahui bagaimana penyusunan laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD Kota Padang sesuai dengan prosedur dan regulasi yang berlaku agar penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas tertata dan transparan dengan langkah-langkah yang tentunya sesuai dan tepat berdasarkan aturan regulasi yang berlaku.

1.8 Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan proposal ini dikelompokkan dalam lima bab, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Bab pendahuluan terdiri dari delapan sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan magang, manfaat magang, tempat dan waktu magang, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab landasan teori membahas mengenai pengertian mekanisme penyusunan laporan pertanggungjawaban, belanja perjalanan dinas.

BAB III : Gambaran Umum instansi

Bab ini menerangkan profil lembaga meliputi sejarah berdirinya perusahaan, visi misi, struktur organisasi.

BAB IV : Analisis Dan Pembahasan

Bab ini merupakan uraian dan pembahasan lanjutan mengenai hasil kegiatan magang mengenai “Mekanisme Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas Pada Sekretariat DPRD kota Padang”.

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir dijelaskan kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah serta saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan demi perbaikan dan perubahan untuk masa yang akan datang.

